



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi pelaksanaan pembangunan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, kemitraan dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta melalui koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pemangku kepentingan lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dipimpin secara penuh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih melalui Pemilihan Umum secara serentak, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Visi dan Misi “**Nusa Tenggara Timur yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan**”.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah 2024-2026, yang menitikberatkan pada pencapaian dan pemenuhan beberapa hal dasar, diantaranya yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan/jembatan dan infrastruktur pengairan serta penguatan ekonomi masyarakat.

Terhadap upaya pemenuhan target dan rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan program prioritas dan program strategis daerah, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan teknis terkait lainnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau RLPPD Tahun 2025 ini kepada Masyarakat dengan muatan meliputi: Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya serta Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah. Selanjutnya, RLPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro di suatu daerah diukur dengan menggunakan beberapa parameter, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia



(IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita dan ketimpangan pendapatan atau gini rasio. Adapun indikator kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan standar *United Nations Development Programme* (UNDP) capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), namun dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, sebesar 69,89 poin, meningkat 0,75 poin (1,08%) dari tahun 2024. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selengkapnya komponen-komponen penentu besaran IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS Provinsi NTT dirinci sebagai berikut:

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,16 tahun, meningkat 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,23 menjadi 13,34 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,20 tahun, dari 8,02 tahun menjadi 8,22 tahun pada tahun 2025. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 201 ribu rupiah (2,36 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Perkembangan IPM Provinsi NTT Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



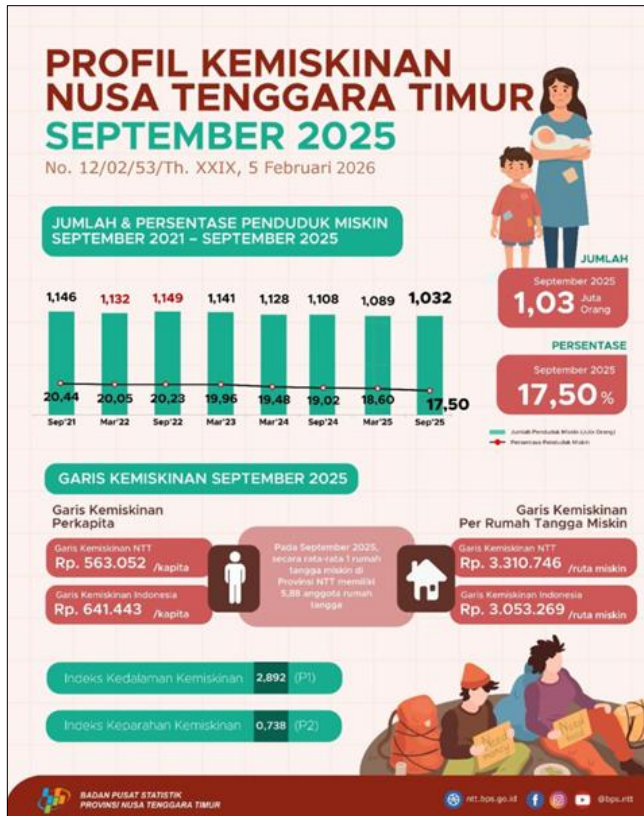


Sumber: BPS Provinsi NTT

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, menurun 1,10 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 1,52 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 1,03 juta orang, menurun 57,09 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 76,24 ribu orang terhadap September 2024

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 6,96 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 7,68 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 sebesar 21,48 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 22,66 persen.

Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan menurun sebanyak 9,31 ribu orang (dari 121,85 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 112,54 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 47,78 ribu orang (dari 966,93 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 919,15 ribu orang pada September 2025). Selanjutnya, jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi NTT

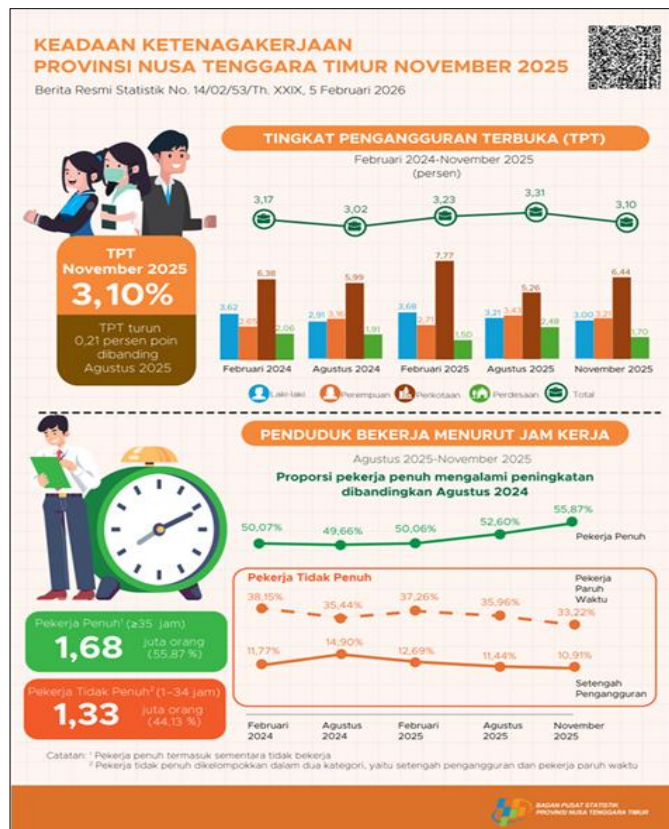
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil Sakernas November 2025 sebesar 3,10 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat tiga orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan 0,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 3,00 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,21 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,22 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,44 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (1,70 persen). Dibandingkan Agustus 2025, TPT perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,18 persen poin dan TPT perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,78 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2025 sampai dengan November 2025. Pada November 2025, TPT penduduk tamatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma, dan Universitas lebih tinggi dibandingkan tamatan pendidikan SD ke bawah. TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 7,46 persen, tertinggi dibandingkan tamatan pada jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, TPT paling rendah berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 0,72 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:





Sumber: BPS Provinsi NTT

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp148,37 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 82,18 triliun.

Ekonomi NTT tahun 2025 tumbuh sebesar 5,14 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 12,43 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,13 persen.

Ekonomi NTT triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 20,35 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 26,92 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 12,63 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,99 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,58 persen. Sedangkan



dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 65,16 persen.

Selengkapnya Pertumbuhan ekonomi NTT Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi NTT

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2025 terhadap tahun 2024 tumbuh positif sebesar 5,14 persen. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,13 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,83 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,75 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2025 (c-to-c), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,85 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,28 persen.

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (65,16 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah PMTB (41,63 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (21,41 persen), Ekspor Barang dan Jasa (6,88 persen),

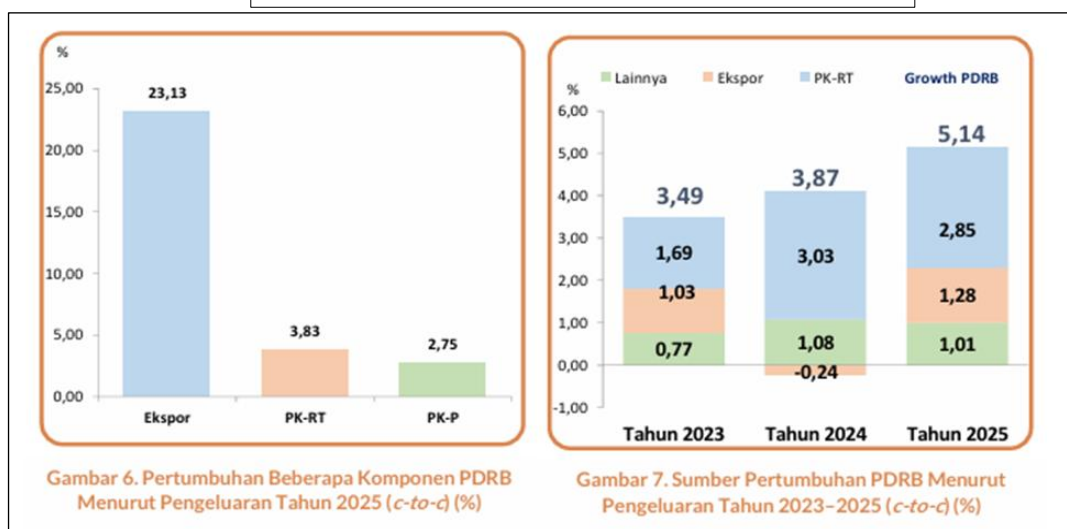


dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,45 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,31 persen.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Triwulan III-IV Tahun 2025 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha (1)	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	Tw III-2025 (2)	Tw IV-2025 (3)	2025 (4)	Tw III-2025 (5)	Tw IV-2025 (6)	2025 (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.214	10.900	42.405	5.266	5.531	21.968
B Pertambangan dan Pengalihan	351	374	1.423	225	239	916
C Industri Pengolahan	550	598	2.198	278	300	1.114
D Pengadaan Listrik dan Gas	34	39	136	20	22	82
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20	20	80	15	15	60
F Konstruksi	3.674	4.188	14.206	2.070	2.331	7.989
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.143	5.334	20.109	2.832	2.883	11.100
H Transportasi dan Pergudangan	1.929	1.936	7.437	1.011	1.018	3.934
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	281	312	1.081	170	182	645
J Informasi dan Komunikasi	2.460	2.538	9.815	2.007	2.056	8.038
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.630	1.626	6.292	867	862	3.356
L Real Estat	978	1.003	3.812	474	474	1.857
M, N Jasa Perusahaan	57	58	221	29	30	114
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.649	5.353	19.209	2.632	2.949	10.855
P Jasa Pendidikan	3.405	3.455	13.447	1.692	1.702	6.717
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.050	1.110	4.104	526	543	2.061
R,S,T,U Jasa Lainnya	615	624	2.399	350	352	1.370
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	37.039	39.468	148.373	20.464	21.492	82.176



Sumber: BPS Provinsi NTT

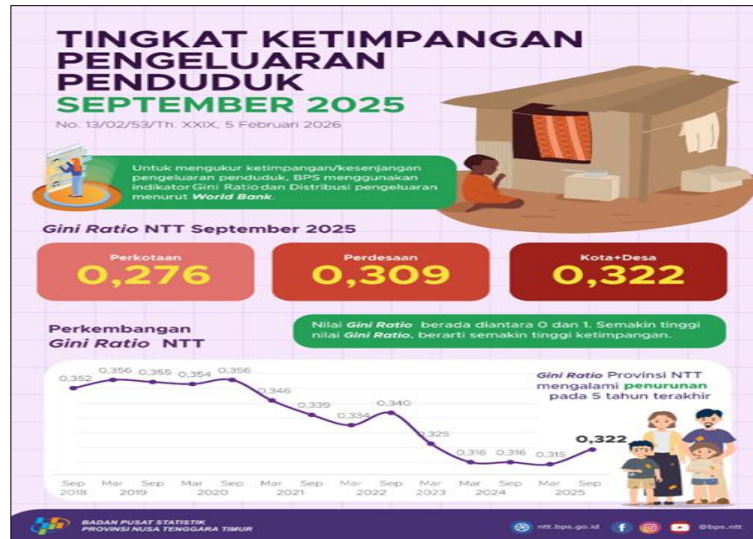
Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,322. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,315 dan meningkat 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,316.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,276; turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,280 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,282.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,309; turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,298 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,306.



Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,43 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,66 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,62 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi NTT

Kedua, Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur urusannya sendiri sesuai karakteristik masing-masing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Implementasi otonomi daerah berupa pelaksanaan urusan konkuren (yang diserahkan ke daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan pula oleh kepala daerah) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah juga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat yang terangkum dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

Capaian pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Urusan Pendidikan, Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada pendidikan menengah sebanyak 215.955 anak (data DAPODIK Desember 2025) dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 336.540 anak (data DUKCAPIL NTT 2025). Sedangkan Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 3.092 anak (data DAPODIK Desember 2025) dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 7.283 anak (data DUKCAPIL NTT 2025).

Urusan Kesehatan, Untuk Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan terealisasi 90,74% dari target 100% yang ditetapkan. Sedangkan untuk Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi, Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Urusan Pekerjaan Umum, untuk Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota, Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota terealisasi 100% dari target yang ditetapkan yakni 100%. Sedangkan Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota terealisasi 100% dari target 100% yang ditetapkan.

Urusan Perumahan Rakyat, Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2025 tidak dilaksanakan karena tidak ada bencana yg berskala bencana Provinsi serta tidak adanya SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi. Begitu juga dengan Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan, Rumah tangga penerima Subsidi Uang sewa dan Rumah tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni tahun 2025 tidak dilaksanakan karena tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

Urusan Trantibum, Pengelolaan ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar 100%, begitupun dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terealisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan. Untuk Sub Urusan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, ditargetkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan terealisasi 100%. Begitu juga dengan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Urusan Sosial, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti pemerintah terealisasi 100%, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti pemerintah terealisasi 100%, Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti



pemerintah, terealisasi 100%, begitupun dengan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi terealisasi sebesar 100%. Sedangkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti tidak dilaksanakan karena di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dijumpai gelandangan dan pengemis sehingga belum menentukan panti untuk melakukan rehabilitasi sosial dasar dimaksud.

Ketiga, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya. Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi ini digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah, serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Terhadap hasil EPPD berdasarkan LPPD Tahun 2024, hingga laporan ini disusun, pemerintah pusat belum menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dimana Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemerintah Provinsi NTT telah berturut-turut mendapatkan opini WTP sejak LKPD TA 2015 sampai dengan sekarang.

Keempat, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp. 5.088.144.463.292,00 dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025



sebesar Rp. 4.556.790.319.568,86 atau 89,56% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selengkapnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

NO	SUMBER PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	5.088.144.463.292,00	4.556.790.319.568,86	89,56
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.774.057.276.424,00	1.299.748.909.453,86	73,26
	1. Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	73,06
	2. Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.906.398.471,19	87,63
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	74,25
	4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.978.614.676,00	40.348.831.058,45	43,87
	B. Pendapatan Transfer	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247	98,12
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.011.347.868,00	203.417.490.868	100,70

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2026

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.187.494.103.513,00 untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi sebesar Rp.4.298.134.676.184,84 atau 82,86% dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan APBD, terdiri dari :

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	
			Rp.	
A	BELANJA OPERASI	5.187.494.103.513,00	4.298.134.676.184,84	82,86
	1. Belanja Pegawai	2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	80,21
	2. Belanja Barang Dan Jasa	1.337.992.772.436,00	1.138.045.412.497,71	85,06
	3. Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	98,44
	4. Belanja Hibah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	98,92
	5. Belanja Bantuan Sosial	13.654.484.000,00	10.332.950.000,00	75,67
B	BELANJA MODAL	400.877.803.012,00	354.426.008.778,93	88,41
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.821.246.690,46	85,96
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06
	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33
	4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.238.721.545,00	147,72
	5. Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	92,71
c.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11
D.	BELANJA TRANSFER	687.676.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29
	1. Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	86,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	19,73
	TOTAL BELANJA	5.187.494.103.513,00	4.298.134.676.184,84	82,86

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2026

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.262.829.210.192,37 atau 100% dari target sebesar Rp.262.829.207.185,00 dan



Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 dengan realiasi sebesar Rp.159.291.542.148,00 atau 97,44% dari yang ditargetkan Rp. 163.479.566.964,00. Selengkapnya anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.829.207.185,00	262.829.210.192,37	100,00
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	262.829.207.185,00	262.829.210.192,37	100,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44
	1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2026

Kelima, Inovasi Daerah. Hingga tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendaftarkan 189 Inovasi dengan total capaian 65% yang tersaji ke dalam tabel berikut ini:



NAMA PERANGKAT DAERAH & NAMA PRODUK INOVASI	BENTUK INOVASI				JENIS INOVASI				STATUS INOVASI				PROGRAM & KEGIATAN	KET
	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	JUMLAH	Digital	Non Digital	Teknologi	JUMLAH	Inisiatif	Uji Coba	Penerapan	JUMLAH		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT	4		1	5	5			5		1	4	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
APLIKASI SIPENKOM (APLIKASI PENILAIAN KOMPETENSI)	1			1	1			1			1	1		
LGD DARING/HYBRID	1			1	1			1		1		1		
Si-Kinerja	1			1	1			1			1	1		
SIMPEG ONLINE	1			1	1			1			1	1		
Sip- Cuti			1	1	1			1			1	1		
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	1	3	2	6	6			6			6	6	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Cash Management System Surat Perintah Pencairan Dana Online dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			1	1	1			1			1	1		
KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)		1		1	1			1			1	1		
Si - Alem	1			1	1			1			1	1		
Sistem Informasi Satuan Harga (e-Harga)		1		1	1			1			1	1		
TPP - ASN		1		1	1			1			1	1		
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)			1	1	1			1			1	1		
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	1	3	2	6	5	1		6	1		5	6	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Aplikasi Elektronifikasi Tilang (E-Lang)	1			1	1			1			1	1		
Pajak Alat Berat terpadu (PABETA)		1		1	1			1			1	1		
Pajak dan Retribusi Online NTT (PRO NTT)		1		1	1			1			1	1		
SAHABAT PAD			1	1		1		1	1			1		
SAMSAT Online Versi 3.0		1		1	1			1			1	1		



Sistem Informasi Data Pajak Kendaraan ASN (SIPAS)			1	1	1			1			1	1		
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		1	1	2		2		2			2	2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
CFC NaBorA Center (Consultation on Fasilitasion of Cooperation in National Border Areas Center/Pusat Konsultasi Fasilitasi Kerja Sama pada Kawasan Perbatasan Negara)		1		1		1		1			1	1		
SIPERMATA (Sistem Perencanaan Tematik Perbatasan)			1	1		1		1			1	1		
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT	4			4	4			4	1	2	1	4	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Cafe & Galeri Mulut Seribu	1			1	1			1			1	1		
E-Booking Wisma NTT	1			1	1			1		1		1		
INOVASI DIGITAL "SI-TENUN"	1			1	1			1		1		1		
Si-KODE	1			1	1			1	1			1		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTT	1	1	3	5	5			5	3		2	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Book of BaPPa RIDa			1	1	1			1	1			1		
Kopi DaRSi			1	1	1			1	1			1		
MUSIK KEREN (Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan Provinsi NTT)			1	1	1			1			1	1		
PAPADANKE (Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah)	1			1	1			1			1	1		
PEMETAAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN DENGAN APLIKASI POWER BI		1		1	1			1	1			1		
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT	1	3	3	7	5	2		7	5		2	7	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
FRONT OFFICE		1		1		1		1	1			1		
PODCAST RESONANSI REGULASI		1		1	1			1	1			1		
Pojok Baca Hukum			1	1		1		1	1			1		
Prosedur Pembentukan Peraturan Gubernur Dan			1	1	1			1			1	1		



Keputusan Gubernur Berbasis Elektronik														
Running Text		1		1	1			1	1			1		
Sistem Digital Monitoring Penandatanganan Produk Hukum Daerah			1	1	1			1	1			1		
Sistem Penanganan Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia (SIPAHAM)	1			1	1			1			1	1		
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT			4	4	3	1		4		1	3	4	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
KOIN YANLIK (KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			1	1		1		1			1	1		
SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (SINJAB)			1	1	1			1			1	1		
SISTEM INFORMASI KETATALAKSANAAN (SINTALA)			1	1	1			1			1	1		
SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN (SIMBAGA)			1	1	1			1		1		1		
BIRO PBJ PROVINSI NTT		2		2	1	1		2			2	2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
KLINIK PENGADAAN NTT BERLARI		1		1		1		1			1	1		
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT		2		2	1	1		2		1	1	2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Layanan Klinik Dokter Sohib (Layanan Klinik Koordinasi dan Konsultasi Bantuan Sosial dan Hibah) Bidang Kesejahteraan Rakyat		1		1		1		1			1	1		
Si Bos Bebeb (Sistem Informasi Bantuan Sosial Beasiswa Berbasis Website)		1		1	1			1		1		1		
BIRO PEREKONOMI SETDA PROVINSI NTT		2	3	5	5			5	5			5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Analys Class		1		1	1			1	1			1		



Aplikasi E-Monev Program Pembangunan			1	1	1			1	1			1		
Database Ekonomi NTT			1	1	1			1	1			1		
Digitalisasi Kearsipan			1	1	1			1	1			1		
Podcast Ekonomi NTT		1		1	1			1	1			1		
BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT		2	1	3		2	1	3			3	3	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Pemanfaatan Aula eLteri Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PALUNG PAD)		1		1		1		1			1	1		
Ruang Penyimpanan Arsip (Record Center)			1	1		1		1			1	1		
Sudut Digital Cerdas (Smart Digital Corner)		1		1			1	1			1	1		
BPSDM PROVINSI NTT		6		6	1	1	4	6			6	6	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Learning Management System SIPIJAR (Sistem Pelatihan dan Pembelajaran Terintegrasi)		1		1			1	1			1	1		
Lopo Tuak Manis BPSDMD NTT		1		1		1		1			1	1		
Podcast Ngopi Sore		1		1			1	1			1	1		
Simpat ASN atau Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran dan Aktualisasi ASN		1		1			1	1			1	1		
Sistem Pelaporan Pelanggaran (SI LALA) BPSDMD NTT		1		1	1			1			1	1		
Sistem Publikasi Laporan Pelatihan (SiPulpen)		1		1			1	1			1	1		
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT	1	1		2		2		2			2	2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
KELABU (Kelas Literasi Anak Bimbingan Perpustakaan)		1		1		1		1			1	1		
Klinik Konsultasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	1			1		1		1			1	1		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	2	1	2	5	1	4		5	2		3	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	



AYO BANGUN NTT MENUJU ALOR IKI UKA GO 2029!!: e-PANEMO Revolusi Perizinan di Taman Perairan Kepulauan Alor dengan Sistem Perizinan Berbasis Teknologi Modern		1		1	1			1	1			1		
AYO BANGUN NTT MENUJU ALOR IKU UKA GO 2029!!: Wisata Menonton Setasea (Paus & Lumba-Lumba) Gabungan Keindahan Alam dan Edukasi di Taman Perairan Kepulauan Alor NTT	1			1		1		1	1			1		
MENUJU ALOR IKI UKA GO 2029!!: Transformasi Cabang Dinas Menjadi UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya membangun Masa Depan Kelautan dan Perikanan Kepulauan Alor			1	1		1		1			1	1		
MENUJU ALOR IKI UKA GO 2029!!: DISIPLIN (Dive Site Integration Program Leading to Improvement for Alor MPA) Taman Perairan Kepulauan Alor- NTT	1			1		1		1			1	1		
MENUJU ALOR IKI UKA GO 2029!!: Penerapan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Melalui Strategi Dan Inovasi Berkelas Dunia.			1	1		1		1			1	1		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTT		10	3	13	8	5		13	5	4	4	13	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
(MOMAM) Mobile Maintenance Mikroskop		1		1		1		1			1	1		
Cek Beta Sehat Ko		1		1	1			1	1			1		
Dinkes Belajar		1		1		1		1			1	1		
DUKCAPIL MENJANGKAU		1		1	1			1	1			1		
KAKAK INDIA (Kegiatan Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital)		1		1	1			1	1			1		
NTT MEMANGGIL		1		1	1			1		1		1		
PERJAKAMANTAP (Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data)			1	1		1		1		1		1		
Podcast "BAPOLES" (Baomong Pola Hidup Sehat)"		1		1	1			1			1	1		



SI CEPAK (Fasilitasi Pencatatan Akta Kelahiran)			1	1		1		1	1			1		
SI-PATEN NTT (Sistem Informasi Terpadu Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur)		1		1	1			1		1		1		
Sistem Infromasi Berbasis Data Kesehatan Terintegrasi (SI BESTIE)		1		1	1			1	1			1		
Strategi Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi NTT - ANTING BERLIAN (Tangani Stunting Lindungi Anak)		1		1		1		1			1	1		
TANYA DUKCAPIL (Temukan Akses Nyata di DUKCAPIL)			1	1	1			1		1		1		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI NTT		3	2	5	5			5	1	2	2	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat)		1		1	1			1			1	1		
Pelayan Data Sektoral (Lopo eNTT)			1	1	1			1			1	1		
PODCAST		1		1	1			1		1		1		
Website Ramah Disabilitas		1		1	1			1	1			1		
Website Sewa Aula Palapa			1	1	1			1		1		1		
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTT		5		5	2		3	5	3		2	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Baomong Koperasi		1		1			1	1			1	1		
Klinik Digitalisasi Koperasi (Klik Koperasi)		1		1			1	1			1	1		
Laboratorium KDKMP		1		1	1			1	1			1		
LOPO UKM NTT		1		1	1			1	1			1		
Sistem Data Terpadu KDMP (SIDatKDKMP)		1		1			1	1	1			1		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT		1		1			1	1			1	1	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPOPS)		1		1			1	1			1	1		
DINAS P3AP2KB PROVINSI NTT	4	3		7		6	1	7	1		6	7		
DP3AP2KB Goes To School		1		1		1		1			1	1		
Eu Manne Gir Hi'ang (Pemulihan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan)		1		1			1	1			1	1		



GERHANA Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	1			1		1		1			1	1		
Inovasi Layanan Publik "COACHING CORNER PUG"	1			1		1		1			1	1		
Inovasi Perlindungan Perempuan melalui Riset (PPmR): "Budaya Kawin Tangkap dalam Perspektif Intervensi Sunrise Model di Sumba - Nusa Tenggara Timur"	1			1		1		1			1	1		
Nusa Care "Nurturing Staff Care"	1			1		1		1			1	1		
Peduli Lansia		1		1		1		1	1			1		
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT		4	2	6	1	1	4	6	1	1	4	6	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
ANTIK FEST : ANA NTT KREATIF FESTIVAL		1		1		1		1			1	1		
BANGDEWI : Pengembangan Desa Wisata			1	1			1	1		1		1		
PEMBUATAN TOURISM INFORMATION CENTER (TIC) BERBASIS WEBSITE		1		1			1	1			1	1		
Pengukuran Sendiri Desa Wisata Aman Bencana "Dewi Ance" berbasis Website		1		1			1	1	1			1		
SiPETIK : SISTEM PENGUMPULAN DATA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF MENGGUNAKAN APLIKASI KOBO COLLECT			1	1			1	1			1	1		
SISTEM PEMBAYARAN TIKET MASUK PANTAI LASIANA KUPANG MENGGUNAKAN QRIS		1		1	1			1			1	1		
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTT		2	1	3	3			3	2		1	3	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Aplikasi Pendaftaran Peserta Dasa Cita		1		1	1			1			1	1		
Website Pemesanan Lapangan Online		1		1	1			1	1			1		
Website SIP-SHBU (Sistem Informasi Penginputan SSH dan SBU Bidang)			1	1	1			1	1			1		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	13	13	1	27	13	13	1	27	2	2	23	27	(BELUM DILAKUKAN	



													BEDAH DPA)	
PERANCANGAN ANTENA PENGUAT SINYAL WIFI _ SMKS TECMATIK INFORMATIKA PLUS			1	1			1	1			1	1		
“Jejak Literasi di SMAN 5 Kupang”,	1			1	1			1	1			1		
ABSENSI ONLINE		1		1	1			1			1	1		
Biru Langitku, Hijau Sekolahku		1		1		1		1			1	1		
BRIKO SMAN 12 Kupang		1		1	1			1			1	1		
Digitalisasi Administrasi Menuju Integrasi Informasi Melalui Media Sosial Dunia QR Code	1			1	1			1			1	1		
GERAKAN SEKOLAH SEHAT (GEMA SEHAT) SMA NEGERI 3 WAINGAPU		1		1		1		1			1	1		
INOVASI E COMMART	1			1	1			1			1	1		
INOVASI PEMBELAJARAN MODEL KOLABORASI PANTAS PANEN HASIL BELAJAR TIGA CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	1			1		1		1			1	1		
Kelas Cuan		1		1		1		1			1	1		
KOMIK DIGITAL DI SMA NEGERI 1 KUPANG	1			1	1			1			1	1		
LAPOR KADIS		1		1	1			1		1		1		
MANGROVER SMANTIG BERSINAR	1			1		1		1			1	1		
MANTAP BOS		1		1	1			1			1	1		
Pembelajaran Model Kolaborasi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan Praktik Nyata Hijaukan Bendungan Rakanamo, Kabupaten Kupang-NTT	1			1		1		1			1	1		
Pembuatan Kerajinan dari Resin dengan memanfaatkan Bahan Alam Sekitar di SMAN 2 Fatuleu	1			1		1		1		1		1		
PEMBUATAN MINYAK SEREH SMANSIX (MINYAK S3)	1			1		1		1			1	1		
PEMBUATAN PEMBERSIH LANTAI S3 (SEREH SMANSIX)	1			1		1		1			1	1		
Penilaian Berbasis IT		1		1	1			1			1	1		
PERPUSTAKAAN ONLINE SMAN 1 KUPANG		1		1	1			1			1	1		



PERPUSTAKAAN TAMAN BACA TI'I LANGGA SMAN 1 KUPANG	1			1		1		1			1	1		
Sekolah Bebas Distraksi : Inovasi Pembatasan Penggunaan HP di Lingkungan Belajar	1			1		1		1			1	1		
SI-GABER (Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala)		1		1	1			1			1	1		
SISTEM AQUAPONIK SMA NEGERI 1 KUPANG	1			1		1		1	1			1		
SMA Negeri 5 Kupang : Garda Terdepan Futsal NTT menuju PON 2028		1		1	1			1			1	1		
Tarian Sumba Kontemporer (TASUKO) SMA N. 3 WAINGAPU		1		1		1		1			1	1		
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	7	1	1	9	2	7		9	4		5	9	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Pendidikan Berjalan Lintas di jalan melalui Kurikulum mUatan Lokal di Provinsi NTT	1			1		1		1	1			1		
PUSPA (Pegawai Unggul, Sehat, Pelayanan Andal)	1			1		1		1	1			1		
SADAR (Sistem Arsip Digital Aman dan Rapi)			1	1	1			1			1	1		
SIAP (Selamat Inklusif Aman Prima)		1		1		1		1	1			1		
Tim ENAM (Tim Katalis Kebijakan Transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur)	1			1		1		1			1	1		
Tim METRA (Tim Media Transparansi Pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT)	1			1	1			1			1	1		
Tim SEMBILAN (Tim Akselerasi Kemitraan Bidang Perhubungan)	1			1		1		1			1	1		
Tim SEPULUH (Tim Optimalisasi PAD Pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT)	1			1		1		1			1	1		
TRC (Transport Research Centre/ Pusat Penelitian Transportasi)	1			1		1		1	1			1		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT		6		6	4	2		6	1		5	6	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	



Aplikasi Digital Sebaran Industri Kecil Menengah (ADSIKIM)		1		1	1			1			1	1		
Dapur Flobamorata Di Kota Kupang		1		1		1		1			1	1		
Gerai Beli NTT		1		1	1			1			1	1		
Klinik Pengaduan Konsumen (KPK)		1		1	1			1	1			1		
NTT Mart		1		1		1		1			1	1		
Pelayanan Pendataan Industri melalui SIINas		1		1	1			1			1	1		
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT		4	1	5	1	4		5	1		4	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
APEHAKU		1		1		1		1			1	1		
Brigade Alat Mesin Pertanian (Alsintan)		1		1		1		1			1	1		
Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)			1	1	1			1	1			1		
EMOR (Efektifitas Mikro Organisme)		1		1		1		1			1	1		
Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK)		1		1		1		1			1	1		
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT		4	1	5	5			5			5	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
Puskeswan Satu Data Peternakan NTT (PUSAKA) NTT			1	1	1			1			1	1		
SISTEM INFORMASI KAWASAN PETERNAKAN (SIKAPETER)		1		1	1			1			1	1		
Sistem Pelaksanaan Analisis Resiko (SILARIS)		1		1	1			1			1	1		
SISTEM PELAYANAN ONLINE VETERINER (SIMPONIVET)		1		1	1			1			1	1		
Sistem Perizinan-Rekomendasi Online (SIROME0)		1		1	1			1			1	1		
DINAS PUPR PROVINSI NTT	1	2	2	5	4	1		5	2	1	2	5	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
IKLI PUPR	1			1		1		1			1	1		
LAPORKO - Laporan Kegiatan Terkelolah			1	1	1			1	1			1		
One Map One Solution		1		1	1			1		1		1		
Podcast Sahabat - PUPR		1		1	1			1			1	1		



SENTUH - PUPR (Sistem Entitas Tamu dan Umpan Balik Harian - PUPR)			1	1	1			1	1			1		
DINAS SOSIAL PROVINSI NTT		4		4	1	3		4			4	4	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
BIKU BEDI GAHANA		1		1		1		1			1	1		
Strategi Graduasi Mandiri (ASI DIRI) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)		1		1		1		1			1	1		
TANDU BANSOS (PEMANFAATAN PADU PADAN DATA UNTUK BANTUAN SOSIAL)		1		1	1			1			1	1		
Timbun Pakarnita (Optimalisasi Kebun Panti Karya Wanita)		1		1		1		1			1	1		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT		4		4	3	1		4	3		1	4	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan)		1		1		1		1	1			1		
Podcast Pintu Karir NTT		1		1	1			1	1			1		
SIKAT-TRANS		1		1	1			1	1			1		
SI-SAGA		1		1	1			1			1	1		
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT	6		2	8	2		6	8	3		5	8	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
a WASi Sekolah	1			1			1	1			1	1		
E-Cermat (penyimpanan data cepat, informatif, aman, dan akurat secara elektronik)			1	1	1			1			1	1		
E-SIDAK V2	1			1			1	1			1	1		
INOVASI E-MASTER			1	1			1	1	1			1		
SIGAP (Strategi Pencegahan Korupsi)	1			1			1	1			1	1		
SIMPEL (Sistem Pengawasan Elektronik)	1			1	1			1			1	1		
SINTAPRODAN	1			1			1	1	1			1		
SISTEM INFORMASI DATA PEGAWAI INSPEKTORAT (SIAPIN)	1			1			1	1	1			1		
PKK PROVINSI NTT	1	1		2		2		2		1	1	2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	



KUJAGA DIRIKU (Sentuhan Boleh Sentuhan Tidak Boleh)	1			1		1		1			1	1		
TBM GEMAS (Taman Bacaan Masyarakat Generasi Emas) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi NTT		1		1		1		1		1		1		
RSUD PROF.DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	2	6		8	3	2	3	8	2		6	8	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
“LOKER” (LAYANAN ANTAR OBAT KE RUMAH)		1		1			1	1			1	1		
LABLING (LABORATORIUM KELILING)		1		1	1			1			1	1		
MABESTI OK (Masalah Beres Penelitian Oke)		1		1	1			1			1	1		
OPTIMOBAT (OPTIMALISASI INDEKS OBAT RAWAT JALAN MELALUI ANALISIS DAN PENETAPAN INDEKS OBAT PADA RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG))		1		1			1	1			1	1		
PATROLI (PETUGAS KONTROL LISTRIK)	1			1		1		1	1			1		
Rasionalisasi Penggunaan Antibiotik Lini 3 (Meropenem)		1		1			1	1			1	1		
SIPARJO (Solusi Sampah An-Organik RS Johannes)	1			1		1		1	1			1		
UC TPP (Unit Cost Tepat Pelayanan Prima)		1		1	1			1			1	1		
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT		1	1	2	1	1		2	2			2	(BELUM DILAKUKAN BEDAH DPA)	
BaDEKAT DPRD (Bangun Digitalisasi, Efisiensi dan Efektif, Kredibilitas, Akuntabilitas dan Adaptif, Transparansi DPRD Provinsi NTT)		1		1	1			1	1			1		
Si Pesat			1	1		1		1	1			1		
TOTAL	49	101	39	189	100	65	24	189	50	16	123	189		



Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur tercinta. Sekian dan terima kasih.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

